

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan bilateral dapat diartikan sebagai hubungan lintas batas dalam lingkup politik maupun non-politik, yang dilakukan oleh dua aktor sosial (yang umumnya berupa negara yang berdaulat). Hubungan bilateral adalah salah satu elemen penting di dalam hubungan internasional. Hubungan bilateral menjadi salah satu jawaban yang dapat menjawab pertanyaan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di ranah hubungan internasional. Beberapa di antaranya seperti pertanyaan mengenai perang dan perdamaian, konflik dan kerja sama, konsep tatanan dunia, lembaga internasional, proses integrasi regional, atau kebijakan luar negeri suatu negara (Ludwig, 2021). Setiap negara tentunya perlu membangun hubungan bilateral yang baik dengan negara lain, tidak terkecuali dengan Israel yang mencoba membangun hubungan bilateral dengan banyak negara meskipun mereka mendapat banyak kecaman negara lain terkait konflik Israel-Palestina.

Saat Israel resmi terbentuk pada 14 Mei 1948, Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali mengakui Israel secara *de facto*, tepat sebelas menit setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, Uni Soviet memberi pengakuan *de jure* kepada Israel tiga hari setelahnya. Israel kemudian menjadi anggota ke-59 PBB pada 11 Mei 1949 (Jewish Virtual Library, n.d.). Berdasarkan data awal 2023 dari Kementerian Luar Negeri Israel, terdapat 166 negara yang telah secara resmi mengakui Israel sebagai

sebuah negara. Selain itu, terdapat 29 negara yang tidak mengakui Israel, beberapa negara tersebut di antaranya adalah Indonesia, Pakistan, Korea Utara, dan Iran (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa Israel telah berhasil mewujudkan hubungan diplomatik dengan mayoritas negara di dunia. Meskipun begitu, tetap ada negara yang enggan untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, dimana alasan terbesarnya adalah karena konflik Palestina-Israel. Salah satu negara yang baru-baru ini melakukan normalisasi hubungan dengan Israel adalah Maroko.

Hubungan diplomatik antara Maroko dan Israel sudah terbentuk sejak lama. Pada 1994, Maroko dan Israel telah secara resmi membuka kantor perwakilan di masing-masing ibu kota negara mereka. Hubungan dagang antara keduanya juga terus berkembang, dimana volume pertukaran dagang kedua negara mencapai sekitar 50 juta dollar AS pada 1999. Namun, saat Intifada Kedua terjadi di Palestina pada Oktober 2000, Maroko memutuskan untuk membekukan hubungannya dengan Israel. Tindakan ini Maroko lakukan atas dasar solidaritas kepada rakyat Palestina. Pada 24 Agustus 2020, Perdana Menteri Maroko, Saad-Eddine El-Othmani menyatakan bahwa Maroko menolak segala bentuk normalisasi dengan entitas Zionis (dalam hal ini adalah Israel) karena tindakan tersebut memperkuat posisi mereka untuk terus melakukan tindakan yang melanggar hak-hak rakyat Palestina (Taher, 2020). Pernyataan Perdana Menteri Maroko ini menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan dari Maroko bahwa mereka akan melakukan normalisasi dengan Israel. Selain itu, Maroko yang sama-sama merupakan negara mayoritas Islam dan berada di Timur Tengah membuat Maroko

memiliki solidaritas yang tinggi dengan Palestina, sehingga potensi adanya pembentukan kembali hubungan diplomatik dengan Israel yang berkonflik dengan Palestina kecil.

Meskipun membekukan hubungan dengan Israel, terlihat beberapa kali Maroko masih berhubungan dengan negara tersebut. Pada 1 September 2003, Menteri Luar Negeri Israel, Silvan Shalom, terlihat mengunjungi Maroko untuk bertemu dengan Raja Mohammed VI. Lalu pada 4 September 2009, Raja Mohammed VI diketahui melakukan diskusi dengan Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel saat itu, mengenai peta perdamaian Timur Tengah. Selanjutnya, pada Februari 2019, Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu diketahui diam-diam bertemu dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di sela-sela waktu saat Sidang Majelis Umum PBB dilaksanakan di New York. Selain itu, terdapat juga hubungan secara historis antara Maroko dengan Israel, yaitu dulu terdapat banyak orang Yahudi Maroko yang melakukan migrasi ke Israel secara berkelompok (Taher, 2020).

Pada 10 Desember 2020, Maroko resmi melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini pertama kali diumumkan melalui postingan akun Twitter Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump (Al Jazeera, 2020). Dengan terjadinya normalisasi ini, Maroko resmi menjadi negara keempat dari jajaran negara-negara Arab yang memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Ketiga negara Arab yang melakukan normalisasi dengan Israel adalah Sudan, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Uni Emirat Arab memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel secara resmi pada tanggal 13 Agustus

2020 (Muhamad, 2020). Lalu pada 11 September 2020, Bahrain juga memutuskan mengikuti jejak Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel (Holland et al., 2020). Selanjutnya, pada 23 Oktober 2020, Sudan memutuskan untuk melakukan normalisasi juga dengan Israel (CNN Indonesia, 2020). Tindakan Maroko yang memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel merupakan sebuah anomali dikarenakan Maroko sudah melakukan pembekuan hubungan terhadap Israel atas dasar solidaritas dan kemanusiaan pada tahun 2000.

Amerika Serikat memiliki peran yang penting dalam membantu mewujudkan terjadinya normalisasi antara Maroko-Israel. Dimana Amerika Serikat memberikan imbalan yang dermawan kepada Maroko, yaitu pengakuan terhadap kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat. Pengakuan ini terjadi di hari yang sama dengan terjadinya normalisasi Maroko-Israel, yaitu pada 10 Desember 2020. Sahara Barat merupakan wilayah yang dianggap sebagai wilayah yang disengketakan oleh berbagai pihak internasional seperti PBB, Uni Eropa dan Uni Afrika (Singer, 2021).

Selain memberikan imbalan kepada Maroko, Amerika Serikat juga memberikan imbalan yang menjanjikan kepada tiga negara Arab lainnya agar bersedia melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Uni Emirat Arab mendapat imbalan berupa kesepakatan senjata militer senilai 23 miliar dollar AS. Bahrain mendapat pernyataan dari Amerika Serikat bahwa sebuah kelompok perlawanan Islam di Bahrain yang dikenal sebagai Al-Mokhtar adalah kelompok teroris berdasarkan hukum. Lalu Sudan mendapat imbalan berupa menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme, penghapusan ini sekaligus mengakhiri berbagai sanksi

yang diberikan Amerika Serikat kepada Sudan selama tiga dekade (Singer, 2021). Dibandingkan dengan imbalan yang diberikan kepada tiga negara Arab lainnya, imbalan yang diberikan Amerika Serikat kepada Maroko merupakan imbalan yang paling memungkinkan untuk menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan wilayah Sahara Barat merupakan wilayah yang sedang berkonflik, pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah Maroko dengan etnis Sahrawi yang tinggal di Sahara Barat yang dipimpin oleh Front Polisario yang juga didukung oleh Aljazair.

Sejak era pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat memang terlihat ingin meningkatkan kedekatan hubungannya dengan Israel. Hal ini terlihat saat terjadi pemindahan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem pada bulan Mei 2018 yang lalu. Selain itu, Amerika Serikat juga terlihat meningkatkan dukungannya terhadap Israel di PBB. Hal ini merupakan kabar baik bagi Israel karena pihak Israel memang sudah sejak lama ingin mendapatkan dukungan Amerika Serikat terkait dengan konflik yang Israel hadapi, yaitu konflik Israel-Palestina (Levi, 2018).

Dengan terjadinya normalisasi Maroko-Israel yang ditengahi oleh Amerika Serikat, terdapat berbagai respon dari pihak internasional. Beberapa di antaranya adalah Iran yang tidak setuju dengan tindakan Maroko dan menganggap bahwa Maroko telah mengkhianati Palestina. Sedangkan negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Oman, dan Uni Emirat Arab menyambut baik tindakan Maroko. Spanyol juga menyatakan dukungannya terhadap normalisasi tersebut (Al Jazeera, 2020). Organisasi-organisasi Palestina seperti *Hamas*, *Islamic Jihad*, dan *the Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP) mengecam tindakan Maroko ini. Juru bicara

Hamas yang bernama Hazem Qassem mengatakan bahwa tindakan Maroko merupakan sebuah dosa politik dan sama sekali tidak memberikan bantuan pada Palestina, namun hanya semakin memperkuat pendudukan Israel dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Normalisasi ini hanya akan membuat Israel semakin bertindak agresif di Palestina. Sedangkan juru bicara dari *Islamic Jihad*, Daud Shihab, mengatakan bahwa tindakan Maroko adalah sebuah bentuk pengkhianatan Maroko kepada Palestina dan Yerusalem, serta sebuah bukti nyata adanya kemunduran rezim pemerintahan dari Negara-Negara Arab. PFLP menyatakan bahwa normalisasi Maroko dengan Israel adalah hari berkabung bagi penduduk Palestina dan seluruh bangsa Arab (Asmar & Semiz, 2020). Selain itu, terdapat juga respon dari *Palestine Liberation Organization's Executive Committee* (PLO), juru bicara PLO, Bassam al-Salhi, sangat mengutuk tindakan Maroko, menurutnya, semua normalisasi dengan Israel adalah tindakan yang tidak dapat diterima hingga Israel mau mengakhiri kependudukannya di Palestina (Al Jazeera, 2020). Respon lain juga muncul dari kelompok-kelompok Islam yang ada di Maroko. *The Unity and Reform Movement* (MUR), yang merupakan partai paling berkuasa di Maroko, mengatakan bahwasanya normalisasi Maroko dengan Israel adalah tindakan yang tercela. *Adl Wal Ihssane*, yaitu kelompok oposisi paling besar yang ada di Maroko mengatakan bahwa normalisasi Maroko-Israel adalah tikaman dari belakang oleh Maroko kepada rakyat Palestina (Eljehtimi, 2020).

Meski mendapat respon negatif dari berbagai pihak, disinyalir terdapat situasi yang menyebabkan Maroko melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu terjadinya eskalasi konflik antara Maroko dengan Sahara Barat pada akhir tahun 2020,

tepatnya pada 16 November. Dimana selama hampir 30 tahun tidak terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi konflik kembali antara kedua belah pihak dan keadaan damai terus berlangsung. Namun Front Polisario melakukan serangan intens yang ditujukan kepada tembok pertahanan militer Maroko, target dari serangan ini adalah berbagai posisi pasukan Maroko yang berada di perbatasan dengan wilayah Sahara Barat. Total jumlah titik yang diserang oleh Front Polisario berjumlah enam, beberapa titiknya adalah pangkalan nomer empat sektor Amgala dan titik peringatan 71 di sektor Hawza. Serangan ini berlangsung sejak pagi hingga siang hari (Lahlou, 2020). Front Polisario selanjutnya juga melakukan serangan keesokan malamnya, yaitu pada 17 November, kepada sebuah pos perbatasan yang ada di Desa Guerguerat. Pos tersebut ada untuk melindungi jalur antara Maroko dengan Mauritania yang melintasi wilayah Front Polisario (DW, 2020b).

Serangan-serangan yang dilakukan Front Polisario adalah bentuk tindakan dari pernyataan resmi pimpinan mereka, Brahim Ghali, pada 13 November 2020, di mana ia menyatakan bahwa mereka secara resmi telah mengundurkan diri dari gencatan senjata yang diinisiasi oleh MINURSO pada 1991. Menurut Menteri Luar Negeri Demokrasi Arab Sahrawi, Mohamed Salem Ould Salek, yang menjadi pemicu penyerangan oleh pihaknya adalah karena Maroko membangun jalur bebas hambatan menuju Mauritania, jalur ini digunakan untuk koridor perdagangan, dimana jalur tersebut dianggap telah merusak perjanjian gencatan senjata. Ia juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pasukan Sahrawi adalah bentuk pembelaan diri dan respon terhadap pasukan Maroko yang dianggap berusaha menggeser tembok perbatasan yang sudah ditentukan.

Dimana sejak 1991, wilayah Sahara Barat dibagi kembali menjadi dua, 80% Sahara Barat menjadi milik Maroko, sedangkan sisa wilayah Sahara Barat yang berada di sepanjang perbatasan Aljazair menjadi milik Republik Arab Sahrawi (DW, 2020b).

Maroko hingga saat ini terus berkonflik dengan etnis Sahrawi di Sahara Barat. Secara historis, Sahara Barat sebenarnya merupakan bagian dari Maroko. Namun, koloni Eropa, yaitu Prancis dan Spanyol, melakukan penjajahan kepada Maroko lalu membagi dua wilayah Maroko dikarenakan mereka terlibat konflik, wilayah bagian utara menjadi milik Prancis, sedangkan wilayah bagian selatan menjadi milik Spanyol. Setelah memperoleh kemerdekaan pada 1956, Maroko mulai gencar menyatukan kembali Sahara Barat sebagai bagian dari Maroko. Tindakan Maroko ini memunculkan konflik karena Sahara Barat tidak ingin bergabung dengan Maroko, etnis Sahrawi menginginkan kemerdekaan atas Sahara Barat. Etnis Sahrawi yang dipimpin oleh kelompok kemerdekaan bernama Front Polisario gencar membela kemerdekaan Sahara Barat (Ariyati, 2019). Saat Spanyol melepaskan Sahara Barat atas desakan berbagai pihak, Front Polisario memproklamasikan wilayah Sahara Barat dengan nama *Sahrawi Arab Democratic Republic* atau disingkat SADR (Adwitama, 2022). Tindakan ini selanjutnya menjadi awal mula terjadinya konflik berkepanjangan antara Maroko dengan etnis Sahrawi yang dipimpin oleh Front Polisario.

Pada 1991, telah dilakukan gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB. Selain itu, PBB juga menjanjikan akan diadakan referendum untuk etnis Sahrawi di Sahara Barat agar mereka dapat memutuskan sendiri masa depannya. Janji PBB ini terlihat dari pembentukan *United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara* atau

disingkat MINURSO (MINURSO, n.d.-b). Saat gencatan senjata terjadi, PBB terus berusaha untuk membantu dalam penyelesaian konflik ini, beberapa cara yang dilakukan PBB adalah melalui negosiasi dan dialog yang dituangkan dalam *Baker's Plan I, II*, dan *Rountable Meeting on Western Sahara* (Ariyati, 2019). Upaya lain yang dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya konflik adalah pembangunan benteng pembatas sepanjang kurang lebih 2700 km di perbatasan antara wilayah kekuasaan Maroko dengan wilayah kekuasaan Front Polisario. Pembangunan benteng tersebut dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak (Salsabila, 2021).

Faktor Maroko yang sedang berkonflik dengan Sahara Barat dan konflik tersebut mulai bereskalasi satu bulan sebelum normalisasi hubungan dengan Israel dapat menjadi salah satu faktor yang menguatkan alasan Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Maroko beberapa bulan sebelumnya yang menyatakan bahwa mereka menolak segala bentuk normalisasi dengan etnis Zionis yang merujuk pada Israel. Hal ini selanjutnya menjadikan topik ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan didasarkan pada latar belakang yang sudah dijabarkan, rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah “Mengapa Maroko memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada Desember 2020 padahal sebelumnya sempat mengecam keras tindakan Israel terhadap Palestina?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum memberikan penjelasan mengenai bagaimana dinamika hubungan antara Maroko dan Israel.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus memberikan analisis yang menjawab rumusan masalah, yaitu latar belakang yang dimiliki Maroko dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dengan menerapkan konsep neorealisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah ditemukannya penjelasan baru mengenai alasan normalisasi hubungan suatu negara berdasarkan konsep neorealisme. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan literatur dalam studi hubungan internasional mengenai konsep neorealisme yang menjadi salah satu faktor normalisasi antara Maroko dengan Israel.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan tambahan informasi mengenai alasan suatu negara melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Dengan adanya informasi dan pengetahuan tersebut, diharapkan pada penelitian-penelitian

selanjutnya dapat menggunakan konsep neorealisme sebagai alat analisis kebijakan luar negeri suatu negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai normalisasi hubungan yang dilakukan oleh suatu negara. Pertama, penelitian oleh Tahmi et al. (2020), penelitian ini menganalisis latar belakang Uni Emirat Arab (UEA) yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada 13 Agustus 2020. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan analisis kepentingan nasional model matriks dari Dr. James N. Rosenau dan Dr. Donald E. Neuchterlein untuk menganalisis normalisasi antara UEA dan Israel. Hasil dari penelitian tersebut adalah peneliti menemukan bahwa terdapat empat persamaan kepentingan antara UEA dan Israel, yaitu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, dan kepentingan perdamaian. Kepentingan politik dan keamanan berkaitan dengan Israel dan UEA yang sama-sama menganggap bahwa Iran yang mengembangkan nuklir adalah sebuah ancaman. Kepentingan ekonomi berkaitan dengan UEA yang melihat kerja sama di bidang ekonomi dengan Israel adalah sebuah keuntungan dalam perekonomian mereka. Lalu kepentingan perdamaian berkaitan dengan keinginan UEA untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah (Tahmi et al., 2022).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Nyoman et al. (2016), penelitian ini membahas bagaimana normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Turki dan Rusia setelah penembakan pesawat Rusia oleh Turki terjadi. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah konsep *Foreign Policy Decision Making* atau

disingkat FPDM. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat faktor domestik dan internasional yang membuat Turki melakukan normalisasi hubungan, faktor domestik berkaitan dengan kondisi ekonomi Turki yang melemah setelah sanksi yang diberikan oleh Rusia kepada Turki karena menembak pesawat Rusia. Sedangkan faktor internasional berkaitan dengan hubungan Turki dengan NATO dan Amerika Serikat yang sedang retak (Nyoman et al., 2016).

Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian oleh Triprasaja, (2017), penelitian ini menganalisis normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba pada tahun 2013-2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *rational choice*. Hasil dari penelitian tersebut dengan menerapkan pendekatan *rational choice* adalah Amerika Serikat melihat normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi mereka karena Kuba bukan lagi ancaman bagi Amerika Serikat, dimana Kuba sudah tidak lagi memiliki sekutu dekat karena runtuhnya Uni Soviet yang kemudian menyebabkan kekuatan militer Kuba juga menurun. Sedangkan apabila Amerika Serikat terus mempertahankan hubungan buruk dengan Kuba, mereka hanya akan terus menghabiskan dana militer dalam jumlah yang tidak sedikit, selain itu, Amerika Serikat juga akan memiliki citra buruk karena saat Amerika melakukan embargo ke Kuba, Amerika Serikat sering dikritik oleh banyak negara (Triprasaja, 2017).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Notodewo & Machmudi, (2022) yang membahas mengenai normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar pada tahun 2021. Peneliti menggunakan alat analisis *grand theory* neorealisme dan

turunannya, yaitu *prisoner's dilemma* dan *relative gain*. Arab Saudi yang awalnya sangat gencar melakukan blokade ekonomi kepada Qatar, bahkan memelopori blokade tersebut kepada sekutu Timur Tengahnya, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir membuat kebijakan normalisasi hubungannya dengan Qatar mengejutkan banyak pihak. Dengan menerapkan alat analisis, hasil dari penelitian ini adalah Arab Saudi melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar sebagai bentuk *balance of power* terhadap kekuatan Turki dan Iran yang membantu Qatar. Alasan lainnya adalah terdapat kondisi-kondisi yang merugikan Arab Saudi seperti pandemi Covid-19 dan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat yang kemungkinan dapat membawa Iran mendominasi Timur Tengah (Notodewo & Machmudi, 2022).

Penelitian lainnya adalah penelitian oleh Krisdananjaya & Syaquillah, (2022), penelitian tersebut membahas tentang normalisasi hubungan yang dilakukan oleh empat negara Arab (Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, dan Maroko) dengan Israel. Alat analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tersebut adalah konsep hubungan, konsep geopolitik, serta interdependensi kompleks. Hasil dari penelitian tersebut adalah setiap pihak memiliki kepentingannya masing-masing, dan kepentingan tersebut menjadi motivasi utama dalam terwujudnya normalisasi tersebut, Uni Emirat Arab berfokus untuk melakukan kerja sama perdagangan, Bahrain fokus pada kerja sama di bidang keamanan, Sudan yang ingin keluar dari penjara geografis mereka, dan Maroko yang fokus pada kerja sama di bidang teknologi dan sebagai bentuk upaya pendekatan dengan pihak Amerika Serikat dengan harapan mereka dapat membantu dalam konflik Sahara Barat, Amerika Serikat yang menjadi fasilitator agar mereka

dapat terus mendominasi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Israel yang berusaha mendekati negara-negara Islam dengan harapan dapat memberi perubahan terhadap konflik dengan Palestina. Hasil penelitian lainnya adalah kebijakan normalisasi dapat menjadi langkah awal untuk pan-Arabisme (gerakan penyatuan negara-negara Arab) (Krisdananjaya & Syauqillah, 2022)

Saat penelitian ini disusun, peneliti belum menemukan penelitian lain yang hanya berfokus dalam membahas bagaimana kebijakan normalisasi hubungan diplomatik antara Maroko dengan Israel dan bagaimana kebijakan tersebut disinyalir terjadi karena pengaruh konflik Maroko dengan Sahara Barat. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya mengeksplor dengan menggunakan pendekatan konsep kepentingan nasional, *foreign policy decision making*, *rational choice*, konsep hubungan, geopolitik, dan interdependensi kompleks. Memang sudah terdapat penelitian sebelumnya yang menggunakan neorealisme, namun peneliti belum menemukan penelitian yang meneliti menggunakan neorealisme yang berfokus pada aspek *balance of threat* dan *bandwagoning*, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada neorealisme dalam aspek *prisoner's dilemma* dan *relative gain*. Hal ini selanjutnya menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam penelitian yang baru serta belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya.

Penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana neorealisme dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menganalisis latar belakang suatu negara dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Melalui penelitian ini, peneliti juga berharap dapat

memberi perspektif baru dalam normalisasi hubungan diplomatik yang didasari oleh neorealisme.

Neorealisme merupakan salah satu aliran yang ada di dalam paradigma realisme. Tokoh yang memberi dasar aliran ini adalah Kenneth Waltz, yang ia tulis di dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics*. Neorealisme ini selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh Stephen Walt dan John Mearsheimer (Rosyidin, 2020). Neorealisme muncul sebagai bentuk kritik terhadap asumsi dasar dari realisme klasik yang beranggapan bahwa perebutan kekuasaan di dalam hubungan internasional adalah bentuk dari sifat dasar manusia. Bagi neorealisme, perilaku negara di dalam hubungan internasional tidak memiliki hubungan dengan sifat dasar manusia. Lebih lanjut lagi, menurut neorealisme, struktur internasional yang anarki memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mendorong negara bersikap agresif (Wardhani et al., 2016). Asumsi dasar dari neorealisme adalah struktur internasional yang bersifat anarki menjadi penyebab dari adanya perang. Perang bukan hanya terjadi karena negara ingin melakukannya, namun karena adanya tekanan struktur. Hal ini menjadikan perang bukanlah sesuatu yang bisa dihindari (Rosyidin, 2020). Neorealisme memiliki pandangan yang sama dengan realisme klasik, yaitu ekonomi dan militer merupakan penentu kekuatan suatu negara. Sehingga, yang dianggap sebagai negara besar atau kuat di dalam neorealisme adalah negara yang memiliki ekonomi dan militer yang kuat (Wardhani et al., 2016).

Tokoh lain dalam neorealisme yaitu Stephen M. Walt dalam bukunya yang berjudul *The Origins of Alliances* menjelaskan mengenai konsep *balance of threat*.

Menurut Walt, terdapat dua cara bagi negara dalam menghadapi suatu ancaman, yaitu *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* adalah melakukan aliansi dengan negara atau pihak lain untuk melawan ancaman. Berdasarkan pandangan ini, negara-negara akan bergabung dalam aliansi untuk melindungi diri mereka dari negara atau koalisi yang sumber dayanya lebih unggul, yang selanjutnya dapat menimbulkan ancaman. Terdapat dua alasan utama negara melakukan *balancing*, pertama adalah karena mereka menempatkan kelangsungan hidup mereka dalam risiko apabila mereka gagal mengekang potensi hegemoni sebelum menjadi terlalu kuat. Alasan kedua adalah melalui bergabung dengan pihak yang lebih lemah, negara yang melakukan *balancing* akan memiliki pengaruh terhadap negara lemah, sedangkan jika melakukan *balancing* dengan negara kuat, pengaruh yang dapat diberikan hanya sedikit, sehingga lebih rentan terhadap kehendak mitranya. Oleh karenanya, *balancing* melalui pembentukan aliansi dengan negara yang lebih lemah harus menjadi pilihan utama (Walt, 1987).

Cara kedua yang dapat dilakukan suatu negara saat menghadapi ancaman menurut teori *balance of threat* adalah dengan *bandwagoning*, yaitu bagaimana negara mendekati diri pada negara yang lebih kuat. Harapannya adalah negara lemah akan mendapat jaminan keamanan dari negara kuat. Dalam *bandwagoning*, semakin kuat negara dan semakin jelas kekuatan tersebut ditunjukkan, maka semakin besar kemungkinan pihak lain untuk bersekutu dengannya. *Bandwagoning* dilakukan dalam dua situasi, yaitu pertama untuk alasan defensif, yaitu sebagai cara untuk menjaga interdependensi suatu pihak dalam menghadapi potensi ancaman. Situasi kedua adalah negara memutuskan melakukan *bandwagoning* dan memilih pihak yang menurut

mereka lebih kuat karena alasan ofensif, yaitu agar dapat berbagi hasil kemenangan (Walt, 1987).

Balance of threat muncul sebagai alternatif yang lebih baik dari *balance of power*. Dimana *balance of threat* tidak hanya fokus pada penyeimbangan kekuatan saja, namun juga bagaimana negara-negara bersekutu dan melakukan *balancing* dalam menghadapi ancaman. Menurut Walt, terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ancaman yang dihadapi suatu negara yang selanjutnya membuat negara memutuskan untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning*. Faktor pertama adalah *aggregate power*, yaitu semakin besar total sumber daya suatu negara (seperti populasi, ukuran, kemampuan ekonomi dll), maka semakin besar pula potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya terhadap negara lain. Faktor kedua, *geographic proximity*, menurut Walt, semakin bertambahnya jarak antar negara, kemampuan suatu negara untuk memproyeksikan kekuatannya akan semakin menurun. Oleh karena itu, negara-negara yang letaknya berdekatan lebih berpotensi untuk menimbulkan ancaman dibanding negara yang letaknya berjauhan. Ketiga, *offensive power*, yaitu negara-negara dengan kemampuan ofensif yang besar lebih memungkinkan untuk memprovokasi negara lain untuk melakukan aliansi dibanding negara-negara yang tidak mampu menyerang karena berbagai faktor. *Offensive power* dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengancam integritas wilayah atau kedaulatan negara lain. Faktor terakhir adalah *aggressive intentions*, yaitu ketika suatu negara dipandang bersikap agresif, kemungkinan besar akan memprovokasi negara lain untuk melakukan perlawanan dengan negara tersebut (Walt, 1987).

Menurut Walt, negara biasanya lebih cenderung untuk melakukan *balancing* daripada *bandwagoning*. Namun, dalam melihat negara lemah, Walt beranggapan bahwa negara lemah pada umumnya lebih cenderung untuk melakukan *bandwagoning* daripada *balancing*. Situasi ini terjadi karena negara lemah hanya memberikan sedikit tambahan kekuatan dari pembentukan koalisi defensif. Karenanya, mereka harus memilih untuk mendekat kepada pihak yang lebih kuat. Selain itu, negara kuat dapat mengubah koalisi yang kalah menjadi koalisi yang menang. Oleh karena itu, keputusan negara kuat dalam memilih pihak dapat menjadi penentu pihak yang menang dan kalah dalam suatu konflik. Selain itu, menurut Walt, terdapat tiga kondisi khusus yang membuat *bandwagoning* lebih menguntungkan untuk dilakukan dibanding *balancing*, yaitu ketika sebuah negara lemah, tidak adanya sekutu, dan adanya kepercayaan bahwa potensi ancaman yang dihadapi oleh negara lemah dapat diatasi dengan melakukan *bandwagoning* ke negara kuat. Lebih lanjut lagi, Walt menjelaskan bahwa negara lemah biasanya akan sangat sensitif terhadap kekuatan negara terdekat. Jika negara-negara besar mempunyai kepentingan dan kemampuan global, negara-negara lemah akan lebih menaruh perhatian pada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka (Walt, 1987).

Pendekatan neorealisme dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian karena pendekatan ini relevan untuk dimasukkan ke dalam kasus yang diangkat. Dimana Maroko termasuk negara lemah di Afrika Utara terutama dalam hal militer dan mereka sedang menghadapi ancaman dari Front Polisario yang sama-sama memiliki militer lemah. Sedangkan Israel dalam bidang militernya memiliki kekuatan yang lebih

besar dari Maroko. Berdasarkan data pada tahun 2020, Israel termasuk ke dalam 20 besar negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Selain itu, Amerika Serikat yang turut ikut campur tangan dalam normalisasi hubungan antara Maroko dengan Israel memiliki militer terbesar di dunia (Global Fire Power, 2023). Sesuai dengan pandangan neorealisme yang beranggapan bahwa kekuatan suatu negara diukur dari militer dan ekonomi mereka, militer yang besar membuat Israel dan Amerika Serikat termasuk ke dalam negara kuat, sedangkan Maroko dengan militernya dikategorikan sebagai negara lemah. Tindakan Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel merupakan bentuk upaya Maroko sebagai negara lemah untuk melakukan *bandwagoning* kepada negara kuat, yaitu Israel. Selain itu, normalisasi ini juga menjadi sebuah perantara untuk Maroko melakukan *bandwagoning* kepada Amerika Serikat. Maroko melakukan *bandwagoning* kepada negara kuat karena mereka dihadapi oleh ancaman, yaitu Front Polisario yang beraliansi dengan Aljazair.

Bandwagoning lebih tepat untuk diterapkan di dalam perilaku Maroko daripada *balancing* karena sesuai dengan pendapat Walt, negara lemah akan cenderung untuk melakukan *bandwagoning* daripada *balancing*. Lebih lanjut lagi, *balancing* umumnya dilakukan dengan membentuk aliansi dengan negara yang lebih lemah, bukan dengan negara yang lebih kuat. Posisi Maroko adalah sebagai negara lemah jika dibandingkan dengan Israel dan Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer-ekonomi lebih besar. Lalu, Maroko juga memenuhi tiga kondisi mengapa lebih menguntungkan untuk melakukan *bandwagoning* dibanding *balancing*, yaitu Maroko adalah negara yang lemah, Maroko tidak memiliki sekutu untuk membantu menghadapi ancaman yang

mereka hadapi, dan Maroko percaya bahwa potensi ancaman yang dihadapi oleh mereka dapat diatasi dengan melakukan *bandwagoning* ke negara kuat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Hal ini selanjutnya menjadikan tindakan yang Maroko lakukan merupakan bentuk *bandwagoning*, bukan *balancing*.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep menjelaskan bagaimana konsep-konsep teoritis yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya diterapkan ke dalam penelitian. Operasionalisasi konsep ini kemudian dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional.

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual akan menguraikan lebih lanjut berbagai konsep dan definisi yang menjadi dasar untuk penelitian ini. Dalam penelitian, digunakan tiga konsep, yaitu normalisasi hubungan, kepentingan nasional, dan hubungan diplomatik.

1.6.1.1 Normalisasi Hubungan

Normalisasi menurut Barston dalam (Hafizh, 2019) dapat diartikan sebagai proses untuk menciptakan kesepakatan bersama dari pihak terkait untuk menghentikan konflik yang dapat dilakukan melalui perjanjian damai, gencatan senjata, atau pembangunan hubungan diplomatik. Lalu normalisasi berdasarkan KBBI dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjadikan normal kembali atau tindakan yang mengembalikan hubungan, keadaan yang biasa atau normal (KBBI, n.d.).

1.6.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sebuah tujuan dan faktor penentu untuk aktor pembuat keputusan dalam membentuk kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai hasil yang diciptakan oleh para pembuat keputusan. Pengertian kepentingan nasional lainnya adalah sebagai suatu hal yang dianggap dapat memberi keuntungan bagi suatu negara (Trahadstadie, 2019).

1.6.1.3 Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik dapat diartikan sebagai sebuah hubungan antara dua negara yang bertujuan agar kedua negara yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan negaranya. Pengakuan dari negara lain adalah komponen yang penting untuk terciptanya hubungan diplomatik di antara kedua negara. Apabila negara, terutama negara yang akan menerima perwakilan diplomatik tidak atau belum mengakui negara bersangkutan, hal ini akan membuat hubungan diplomatik tidak dapat tercipta dan terlaksana. Apabila suatu negara setuju untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain dengan menerapkan asas timbal balik dan asas saling menyetujui, negara terkait sudah dapat mengirimkan perwakilan diplomatiknya (Saija, 2014).

1.6.2 Definisi Operasional

Setelah menguraikan konsep-konsep yang digunakan secara dasar, selanjutnya adalah menerapkan konsep-konsep yang digunakan tersebut ke dalam penelitian ini.

1.6.2.1 Normalisasi Hubungan

Normalisasi hubungan akan berguna untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan hubungan antara Maroko dengan Israel yang memutuskan untuk saling

bekerja sama untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Normalisasi hubungan akan menjelaskan juga bagaimana hubungan sebelum dan sesudah normalisasi hubungan terjadi.

1.6.2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional akan berguna untuk mempelajari kepentingan nasional milik Maroko apa saja yang memiliki dampak dalam munculnya kebijakan dari pemerintah Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020.

1.6.2.3 Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik akan berguna untuk menjelaskan bagaimana awal mula hubungan antara Maroko dengan Israel hingga akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan saling mengirim perwakilan dari masing-masing negara.

1.7 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dengan didasarkan pada pokok permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya adalah Maroko melakukan normalisasi dengan Israel didasari atas keinginan Maroko untuk mendapat pengakuan dari negara adidaya, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, terhadap wilayah Sahara Barat yang masih menjadi perebutan antara Maroko dengan Front Polisario yang menyebabkan munculnya konflik. Apabila menerapkan neorealisme, latar belakang Maroko melakukan normalisasi hubungan dengan Israel adalah bentuk Maroko melakukan *bandwagoning* atau mendekati diri pada negara kuat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Dengan mendekati diri kepada Amerika Serikat dan Israel sebagai negara

yang kuat secara militer, harapannya Amerika Serikat dan Israel dapat memberikan bantuan kepada Maroko dalam menghadapi potensi ancaman yang sedang dihadapi Maroko, yaitu konfliknya dengan Aljazair dan Front Polisario di Sahara Barat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian secara mendalam.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah eksplanatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mengaitkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya yang berkaitan lalu menganalisisnya sehingga didapat penjelasan dari peristiwa yang diangkat menjadi penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dari penelitian ini yaitu Maroko dan Israel yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Selain itu, Sahara Barat juga menjadi subjek dalam penelitian ini karena berkaitan erat dengan Maroko dalam normalisasi hubungan tersebut. Amerika Serikat juga menjadi subjek dalam penelitian ini karena adanya campur tangan negara tersebut dalam normalisasi hubungan Maroko dengan Israel.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data ini berbentuk kalimat dan kata yang menjelaskan mengenai sebuah kejadian atau fenomena.

1.8.5 Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer yang akan digunakan di dalam penelitian ini akan berasal dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah pernyataan dari Maroko dan Israel terkait normalisasi. Selain itu, pernyataan pemerintah Amerika Serikat mengenai normalisasi Maroko dengan Israel juga akan dijadikan sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini akan berasal dari jurnal, artikel, berita, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik atau keterkaitan dengan penelitian yang diambil.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka. Melalui studi pustaka, data-data untuk penelitian akan didapatkan dan dicari melalui sumber-sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, sumber internet yang isinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan buletin cetak.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan teknik kongruen, yaitu penerapan asumsi-sumsi dasar dari sebuah teori untuk dicocokkan dengan data dan fakta yang peneliti dapatkan dalam menyusun penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data

Dengan desain penelitian yang sudah dibuat, mulai dari rumusan masalah hingga sistematika penulisan pada bab ini. Maka penelitian dapat dikatakan layak dikarenakan sumber-sumber yang digunakan di dalamnya dapat dipercaya dan kredibel. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pencantuman referensi yang kredibel seperti pernyataan resmi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan pernyataan resmi dari Maroko dan Israel terkait perjanjian normalisasi hubungan

1.8.9 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab, yaitu:

1. Bab I berisi pendahuluan dari penelitian yang berisi penjelasan dari latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, dan metodologi penelitian ini.
2. Bab II akan berisi mengenai data-data terkait topik normalisasi hubungan Maroko dengan Israel.
3. Bab III akan berisi analisis normalisasi Maroko dengan Israel berdasarkan neorealisme. Akan dijelaskan bagaimana penerapan neorealisme di dalam normalisasi hubungan tersebut.

4. Bab IV atau penutup akan berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang disebutkan di dalam Bab I.